

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat multikultural atau berbhineka adalah ciri khas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebinekaan itu, di satu pihak bisa menjadi aset yang sangat berharga sepanjang tetap dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila; tetapi sebaliknya bisa juga menjadi penyebab konflik apabila yang dikedepankan oleh pihak tertentu adalah etnosentrisme, prasangka etnik, eksklusivisme, ekstrimisme, intoleransi, egoisme, hegemoni dan dominasi terhadap pihak lain.

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat dan arus informasi yang makin terbuka, di satu pihak membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi di lain pihak menimbulkan masalah dan tantangan yang makin kompleks. Hal ini tampak dengan munculnya nilai-nilai dan norma-norma baru yang tidak serasi dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta timbulnya aspirasi-aspirasi yang melampaui kemampuan dan daya dukung yang tersedia. Untuk itu, masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda perlu memperkokoh jati diri ke-Indonesiaannya sehingga tidak terpengaruh oleh berbagai budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, bahkan memperlemah ketahanan dan integritas bangsa. Akhir-akhir ini konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal tampak makin merebak terjadi di Indonesia. Bahkan konflik itu ada yang mengarah kepada disintegrasi

bangsa yang menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau dikaji secara mendalam, sumber konflik itu tiada lain adalah perebutan pengaruh dan sumber daya, baik ekonomi, politik maupun sosial-budaya, serta primordialisme, eksklusivisme dan ekstrimisme, baik atas nama kelompok, daerah, etnik, partai, maupun agama. Untuk menjaga keajegan NKRI yang dilandasi Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika diperlukan pemahaman, kesadaran, apresiasi, dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya, ras, etnik, agama, dan adat-istiadat yang diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan itu akan tercapai manakala bangsa Indonesia telah memiliki kecerdasan yang komprehensif dan kompetitif. Di dalam rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014 terungkap bahwa manusia cerdas secara komprehensif meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009-2014 memaparkan bahwa manusia yang cerdas secara spiritual adalah insan yang beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Sosok yang cerdas secara emosional dan sosial adalah insan yang beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang :

dan memupuk hubungan timbal balik; demokratis; empatik dan simpatik; menjunjung tinggi hak asasi manusia; ceria dan percaya diri; menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Manusia yang cerdas secara intelektual adalah sosok yang beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif. Cerdas secara kinestetis adalah insan yang beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, serta mampu melakukan aktualisasi insan adiraga.

Sedangkan ciri manusia kompetitif meliputi berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat.

Kombinasi antara kecerdasan komprehensif dengan kecerdasan kompetitif, akan melahirkan sosok yang siap membangun bangsa untuk mencapai kejayaannya. Manusia yang cerdas secara komprehensif dan kompetitif merupakan modal pembentukan bangsa yang kokoh dan maju untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dan perdamaian dunia secara berkeadilan.

Rumusan kecerdasan komprehensif dan kompetitif, mengisyaratkan bahwa kecerdasan yang dituntut pada manusia Indonesia tidak bersifat parsial.

Mutu sumber daya manusia tidak hanya diperlihatkan dengan kecerdasan kognitif semata, tetapi menyeluruh pada seluruh domain kecerdasan manusia.

Pendidikan juga dituntut mampu membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal.

Dalam rencana strategis Depdiknas tahun 2010-2014 disebutkan bahwa Paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang memperlakukan anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anak menemukan bakat atau minatnya. Guru sebagai fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya serta menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki. Guru bukan hanya memberikan pengajaran yang dibutuhkan melainkan juga memberikan teladan hidup dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan

dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Dalam perspektif sosial kemasyarakatan, pendidikan dituntut melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang mengarah pada pembentukan formasi sosial baru. Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat, keluarga, komunitas, perkumpulan masyarakat, dan organisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga negara.

Tilaar (2004:21), di dalam bukunya yang berjudul "paradigma baru pendidikan nasional", mengajukan tiga konsep mengenai paradigma baru pendidikan nasional, yakni sebagai berikut. 1) Redefinisi Pendidikan Nasional, yakni pertama, pendidikan tidak dapat dibatasi hanya sebagai schooling belaka, karena mengakibatkan pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata, serta

masyarakat terlempar dari tanggungjawabnya dalam pendidikan sehingga pendidikan formal dan in-formal perlu disempurnakan. Kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik tetapi pengembangan seluruh spektrum intelegensi manusia didalam kurikulum yang luas dan fleksibel serta di dalam pendidikan formal maupun non-formal, sehingga tidak hanya melahirkan manusia pintar tetapi juga manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*). 2) Pendidikan adalah proses pemberdayaan, yakni pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat berpikir kreatif, mandiri, dan dapat membangun dirinya serta masyarakat. Manusia yang berdaya adalah manusia yang produktif, 3) Pendidikan adalah proses pembudayaan, yakni pendidikan yang diarahkan kepada berkembangnya kepribadian seorang yang mandiri sebagai anggota masyarakat yang demokratis.

Aktualisasi pendidikan nasional dengan posisi dan paradigma baru dalam mewujudkan masyarakat Indonesia baru dikemukakan lebih lanjut oleh Tilaar dalam prinsip-prinsip dasar pendidikan sebagai berikut: (1) Partisipasi masyarakat, yaitu sesuai dengan tuntutan masyarakat demokrasi maka masyarakat harus ikut serta secara aktif di dalam menyelenggarakan pendidikannya; (2) Sumber daya manusia yang profesional. Desentralisasi dan demokratisasi proses pendidikan memerlukan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional, baik tenaga guru maupun administrasi pendidikan serta lembaga-lembaga yang terkait dengan dunia pendidikan; (3) Sarana dan sumber daya pendidikan penunjang yang memadai; (4) Artikulasi sistem pendidikan sesuai

dengan jiwa desentralisasi.

Pendidikan dalam upaya pengembangan masyarakat harus dilakukan secara sinergetik sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam hubungan ini Abdul Azis Wahab (2008:290) menyatakan sebagai berikut.

Paradigma manajemen pendidikan sentralistik terbukti tidak memadai untuk menangani berbagai perubahan dan perkembangan yang ada, apalagi untuk menjangkau jauh ke depan sesuai dengan tuntutan peran pendidikan yang sesungguhnya. Hal tersebut menuntut paradigma baru manajemen pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman yaitu manajemen pendidikan desentralistik

Masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam kenyataannya merupakan suatu masyarakat yang bhineka. Nilai-nilai budaya yang konkret adalah nilai-nilai yang terdapat dalam budaya lokal. Oleh sebab itu pengakuan terhadap budaya lokal berarti pengakuan terhadap nilai-nilai yang mendasari tingkah laku dan tindakan manusia Indonesia. Pengakuan terhadap kebhinekaan tersebut berarti suatu langkah ke arah pengakuan identitas. Identitas seseorang di dalam budaya lokal perlu diperluas horizonnya pada dimensi nasional bahkan global.

Mencermati fenomena kebhinekaan dari budaya Indonesia, maka Tilaar (2004) menawarkan sebuah konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) sebagai konsekuensi dan konsep integrasi antara pendidikan dan kebudayaan. Pemeliharaan dan pelestarian kantong-kantong kebudayaan lokal merupakan langkah menuju pelestarian budaya nasional. Karena pada intinya kebudayaan lokal merupakan dasar dari pengembangan budaya nasional.

Untuk itu pendidikan berteman budaya merupakan wahana penting dan medium yang efektif juga untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan

nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga sekolah utamanya siswa, yang mesti terus dikampanyekan. Dalam rangka desentralisasi pendidikan dan menyikapi fenomena rendahnya kemampuan psikomotorik masyarakat, khususnya para siswa, maka dituntut adanya pendidikan yang mampu merangsang tumbuhnya keterampilan belajar. Tujuan dari keterampilan belajar ialah dimilikinya kemampuan memecahkan masalah secara bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut harus didahului dengan kemampuan mengenali hakikat diri, potensi dan bakat-bakat terbaik serta berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potensi hingga menjadi diri sendiri seutuhnya (Anwar, 2004:9).

Pendidikan dituntut menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting apalagi ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Penggalan dan pengembangan potensi yang ada menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dan meninggikan identitas bangsa yang demikian beragam.

Dengan mempertimbangkan kebhinekaan bangsa Indonesia dalam berbagai aspeknya, serta tuntutan pendidikan yang lebih berkualitas, maka pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang

pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Departemen Pendidikan Nasional sungguh amat arif dan bijaksana karena telah memikirkan model pendidikan multikultural. Hal ini tampak dengan adanya penelitian pengembangan model pendidikan multikultural untuk pendidikan dasar dan menengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sangat penting dan strategis mengingat Indonesia mempunyai kebinekaan dalam wujud ras, etnik, budaya, adat istiadat, agama, dan seni. Populasi penelitiannya adalah pendidikan dasar SMP/MTs, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, dimana wilayah provinsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu wilayah Indonesia Barat yang meliputi Jawa dan Sumatera serta wilayah Indonesia Timur meliputi Sulawesi dan Bali. Dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah, secara apriori ditentukan enam provinsi sebagai sampel. Wilayah Indonesia Barat meliputi Jatim, DIY, Sumbar, Sumut; sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur adalah Sulsel dan Bali. Dengan memperhatikan heterogenitas etnis, budaya, sosial, dan agama maka kabupaten/kota yang dipilih dari wilayah provinsi itu adalah Malang untuk Jatim, Yogyakarta untuk DIY, Padang untuk Sumbar, Medan untuk Sumut, Makasar untuk Sulsel, dan Singaraja untuk Bali. Dari tiap kabupaten/kota secara purposif dan kuota ditentukan tiga SMP/MTs, kecuali di Provinsi Bali 4 SMP/MTs. Penentuan sampel sekolah ditetapkan berdasarkan (1) sedang

melakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); (2) memiliki heterogenitas etnis, budaya, sosial, dan agama.

Di Provinsi Bali, yang dijadikan sampel dalam pengembangan model pendidikan multikultural adalah SMP Lab Undiksha, SMP Negeri I, MTs Tegalinggah dan MTs Negeri Seririt, Singaraja Bali. Penelitian di enam provinsi tersebut menghasilkan sebuah model pendidikan multikultural terintegrasi berbasis kompetensi yang dijabarkan dalam silabus mata pelajaran.

Pelaksanaan program pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali telah berlangsung sejak tahun ajaran 2007/2008. Dari pengamatan peneliti pada studi pendahuluan di lapangan, ternyata masih banyak ditemukan fenomena rendahnya prilaku pendidikan multikultural dikalangan siswa pada awal pelaksanaan program pengelolaan pendidikan multikultural, di tengah-tengah budaya masyarakat sekitar yang majemuk, tetapi tidak diikuti dengan semangat dan kreatifitas anak-anak sebagai pewaris dan pelestari budaya yang berbhineka. Fenomena ini merupakan ironi budaya yang perlu untuk dicermati dan dikaji oleh institusi pendidikan termasuk SMP/MTs di Provinsi Bali.

Untuk melihat sejauhmana kebermaknaan program ini terhadap tujuan akhir program yakni terwujudnya siswa yang berpendidikan multikultural, maka pengkajian secara lebih kritis dan sistematis sangat penting dilakukan. Penelusuran secara mendalam proses pengelolaan pendidikan multikultural sangat penting dilakukan, dan penggambaran apa adanya dari aktivitas siswa menjadi dasar penyimpulan keterjadian pengelolaan pendidikan multikultural.

Dari proses penelusuran tersebut, evaluasi terhadap program yang

dilakukan menjadi amat penting. Pengelolaan pendidikan multikultural sebagai sebuah program perlu mendapat penilaian secara holistik. Dari penilaian tersebut maka akan terungkap sejauhmana efektifitas program dimaksud. Disamping hal tersebut, memandang program pengelolaan pendidikan multikultural ini sebagai sebuah kebijakan sekolah yang relatif baru, maka untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, untuk menjamin cara kerja yang efektif, maka perlu dilakukan evaluasi program.

Evaluasi program merupakan evaluasi dalam rangka pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Morrison (Abdjul, 1982) ada tiga faktor penting dalam konsep evaluasi, yaitu : pertimbangan (*judgement*), deskripsi obyek penilaian, dan kriteria (*defensible criteria*). Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto dan Cepi, 2004:7). Pemetaan konteks, masukan, proses, dan hasil dari program ini sangat penting dilakukan untuk memutuskan sejauhmana efektivitas program tersebut. Oleh karenanya, maka model evaluasi yang dipakai mengevaluasi program manajemen pendidikan berbasis multikultural dalam penelitian ini adalah model CIPP (*Context, Input Process, Product*) gagasan dari *Stufflebeam*. Hasil evaluasi model CIPP dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam empat macam bentuk keputusan yaitu : (1) perencanaan; (2) strukturisasi; (3) implementasi dan (4) daur ulang (Marhaeni,

2007:37). Untuk mencapai keempat tujuan ini, maka model CIPP mengevaluasi empat macam unsur yaitu: (1) *context evaluation* yaitu evaluasi terhadap konteks; (2) *input evaluation* yaitu evaluasi terhadap masukan; (3) *process evaluation* yaitu evaluasi terhadap proses, dan (4) *product evaluation* yaitu evaluasi terhadap hasil.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada efektifitas program pengelolaan pendidikan multikultural. Evaluasi secara komprehensif terhadap program pengelolaan pendidikan multikultural ini menjadi sangat penting untuk pemetaan kondisi serta dalam rangka pengambilan keputusan terhadap keberlangsungan program pengelolaan pendidikan multikultural tersebut.

Adapun aspek – aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Latar belakang pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali.
2. Proses pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali.
3. Efektifitas program pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali ditinjau dari aspek konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*).
4. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan program pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali dan alternatif pemecahannya.

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa pengetahuan, sikap, dan perilaku multikultural dikalangan siswa masih sangat rendah di tengah-tengah budaya masyarakat sekitar yang majemuk, tetapi tidak diikuti dengan semangat dan kreatifitas anak-anak sebagai pewaris dan pelestari budaya yang berbhineka?
2. Mengapa diperlukan pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas, dalam penelitian ini disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah yang menjadi latar belakang pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah proses pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali?
3. Bagaimanakah efektivitas program pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali ditinjau dari aspek konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*) ?
4. Apakah terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali dan bagaimana alternatif pemecahannya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran empirik tentang pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali.

2. Menganalisis berbagai kendala dalam pengelolaan pendidikan multikultural yang ditinjau dari aspek konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*).
3. Mencari alternatif strategi pengelolaan pendidikan multikultural pada SMP/MTs di Provinsi Bali, berdasarkan model pendidikan multikultural yang telah dikembangkan dan dikelola selama ini.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian di atas, maka temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat pada nilai akademis dan nilai praktis.

1. Nilai akademis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang perumusan dan implementasi pengelolaan pendidikan multikultural pada tingkat sekolah menengah untuk menyukseskan pelaksanaan KTSP yang bermutu dan berkualitas.
- b. Sebagai referensi dan inspirasi bagi peneliti lain dalam melakukan kajian terhadap program pengelolaan pendidikan multikultural, serta pengembangan KTSP secara umum.

2. Nilai praktis

- a. Bagi siswa SMP/MTs, hasil penelitian ini memberikan informasi dalam rangka menemukenali potensi diri khususnya perilaku pendidikan multikultural dan signifikansinya bagi kehidupan pasca usia sekolah untuk terjun dimasyarakat sehingga tercipta kegairahan dalam belajar dan pengembangan perilaku multikultural.

- b. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini merupakan media reflektif untuk mengembangkan diri khususnya dalam membina program manajemen pendidikan berbasis multikultural.
- c. Bagi SMP/MTs, hasil penelitian ini merupakan informasi yang akurat untuk penyempurnaan program manajemen berbasis multikultural dalam rangka mengembangkan pendidikan multikultural siswa dan seluruh warga sekolah.
- d. Bagi orang tua siswa dan komite sekolah, hasil penelitian ini merupakan upaya pengungkapan pengembangan prilaku pendidikan multikultural bagi siswa sebagai referensi kebijakan orang tua pada pendidikan di keluarga.
- e. Bagi sekolah lain, hasil penelitian ini merupakan referensi empirik dalam pengembangan KTSP khususnya program manajemen pendidikan berbasis multikultural.
- f. Bagi dinas pendidikan, hasil penelitian ini memberikan informasi yang bisa dijadikan salah satu alternatif model untuk didesiminasikan kepada sekolah lain dalam perumusan program pengelolaan pendidikan berbasis multikultural sebagai upaya akselerasi pelaksanaan KTSP yang berkualitas.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas alur berpikir peneliti dalam pelaksanaan studi evaluasi ini, maka dibuatkan kerangka pikir seperti pada gambar 1.1 di bawah ini.



Pada gambar di atas, terlihat alur pemikiran tentang pelaksanaan evaluasi terhadap program pengelolaan pendidikan multikultural. Kerangka pikir ini dimulai dari hasil penelitian pengembangan model pendidikan multikultural untuk pendidikan dasar pada tahun 2007 oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional pada SMP/MTs di Provinsi Bali yang menemukan bahwa pendidikan multikultural mengarah pada usaha memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultur yang esensial, penuh prasangka dan bersifat diskriminatif ke arah perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan bersifat terbuka. Perubahan paradigma ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka. Jadi, secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak (*multiple learning environments*) dan yang sesuai dengan kebutuhan akademik maupun kebutuhan sosial peserta didik.

Dengan berpegang pada gagasan tersebut dapat dikemukakan tujuan program pendidikan multikultural adalah membantu peserta didik: pertama, memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat. Kedua, menghormati dan mengapresiasi kebinekaan budaya dan sosio-historis etnik. Ketiga, mengubah sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purbasangka. Keempat, memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, religius, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik, ketimpangan, dan keterasingan etnik. Kelima, meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis

masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis, atau sebuah inkuiri dialogis. Keenam, mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil, dan bebas. Ketujuh, mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.

Dengan demikian, pendidikan multikultural memerlukan strategi yang jelas, tidak saja bertalian dengan tujuannya, tetapi juga penyiapan tenaga gurunya dalam berbagai aktifitas pembelajaran di kelas. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, penyelenggaraan pendidikan multikultural memerlukan pula kerja sama dengan lembaga lainnya, terutama keluarga, mengingat bahwa orang tua adalah guru multi-etnik dan guru multikultural yang pertama dan yang utama.

Atas dasar hal tersebut di atas, dan dengan telah dirumuskannya kurikulum pada SMP/MTs di Provinsi Bali dengan KTSP yang menyisipkan pendidikan multikultural terintegrasi berbasis kompetensi, maka pengembangan pendidikan multikultural diintensifikasi melalui program pengelolaan pendidikan multikultural. Setelah hampir 4 semester berjalan, maka pertanyaan besar apakah pendidikan multikultural dapat dikelola secara efektif atau sebaliknya. Untuk hal tersebut, maka perlu dilakukan penelusuran kritis tentang latar belakang pengelolaan pendidikan multikultural melalui studi kualitatif. Disisi lain, pengelolaan pendidikan multikultural sebagai sebuah program, penting juga mendapat penelusuran yang sistematis dan komprehensif melalui studi evaluatif. Untuk hal tersebut dilakukan evaluasi program yang menggunakan model CIPP. Evaluasi CIPP yang dilakukan melibatkan empat aspek yakni konteks, masukan, proses, dan hasil.

Dari hasil evaluasi tersebut, maka akan ditemukan sejauhmana

efektivitas program pengelolaan pendidikan multikultural tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, akan dicarikan solusinya untuk menjadi bahan rekomendasi. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai perbaikan program dimaksud.

G. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah sekolah, dan lokasi penelitiannya adalah SMP N I Singaraja, SMP Lab Undiksha, MTs Tegallingah, dan MTs Negeri Seririt yang seluruhnya ada di Provinsi Bali.